

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Maksud diadakannya ruang terbuka hijau adalah agar terjaganya keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan kota serta terwujudnya keseimbangan antara lingkungan buatan dan alam di suatu kota dan agar adanya peningkatan lingkungan yang berkualitas, bagus, cantik, bersih dan nyaman. Tiap-tiap daerah bertanggung jawab untuk mengelola ruang terbuka hijau di wilayahnya dengan aturan desentralisasi daerah. Indonesia merupakan suatu negara yang memakai sistem desentralisasi daerah, dimana tiap-tiap daerah mempunyai wewenangnya sendiri dalam pengembangan wilayahnya, misalnya Pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah adalah sebuah cara bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk saling mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat.

Akan tetapi problemnya selama pengimplementasian oleh pemerintah lokal cenderung berfokus dan lebih perhatian terhadap program yang tujuannya untuk meningkatkan sektor perekonomian dibandingkan lingkungan padahal ruang terbuka hijau sangat diperlukan oleh pemerintah lokal, melalui beragam kebermanfaatan sirkulasi udara di perkotaan, penampung air hujan, serta melalui ruang terbuka hijau juga mempunyai manfaat dalam peningkatan perekonomian misalnya tempat bagi UMKM yang masih memulai bisnisnya. Ini bisa diketahui karena masih minimnya ruang terbuka hijau publik di tiap-tiap daerah di Kota Jambi

serta minimnya penjagaan ruang terbuka hijau di Kota Jambi yang menjadi problem di Kota Jambi.

Menurut Purnomohadi menjelaskan bahwasanya RTH ialah sebetang tanah yang tidak ada bangunan dalam bentuk apapun diatasnya melainkan hanyalah berisikan beragam tumbuhan hijau, serta dicirikan dengan adanya berbagai pohon dan tumbuhan lain yang dibutuhkan, bunga, semak, dan rumput-rumput yang fungsinya sebagai pelengkap untuk menutupi tanah ataupun pelengkap lainnya yang difungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau dengan memiliki beragam fungsi, yakni secara sosial difungsikan sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk rekreasi, olahraga, dan juga Pendidikan. Fungsi lainnya ialah sebagai pelindung sistem air sebagai penanggulangan banjir, menjadikannya paru-paru kota, pemercantik sebuah kota melalui keindahannya, serta dapat menjadi suatu keunikan kota terhadap pengelolaan arsitektur sebuah perkotaan.¹

Ruang terbuka hijau dalam sektor pembangunan semestinya memiliki fokus utama yang mestinya dipertimbangkan pemerintah daerah, akan tetapi kenyataannya tidak sedikit daerah yang belum berfokus pada kepentingan ekosistem lingkungan dan hanya berfokus di sektor kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Dengan demikian, pemerintah pusat menetapkan peraturan Bersama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memandatkan kebijakan khusus kepada masing-masing daerah untuk menciptakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dimana terdapat ruang terbuka hijau publik sebesar 20%

¹ Priyanto Heri. 2018 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, hlm 1.

sedangkan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%. Pembangunan tersebut juga perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya yang juga sudah ditetapkan misalnya aspek ekologis, ekonomis, dan juga keseimbangan kebersihan lingkungan, serta kebutuhan sosial budaya.

Pada sebuah kota, ruang terbuka hijau dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan dan perkembangan terhadap pesatnya suatu kota. Wilayah dengan pertumbuhan yang tinggi pun dapat menciptakan efek negatif terhadap sebuah kota., peningkatan jumlah pertumbuhan, dan juga penurunan kualitas daerah tersebut terjadi akibat masih kurangnya jumlah ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi.² Kurangnya Ruang Terbuka Hijau sekarang menjadi sebuah masalah yang dimiliki oleh hampir setiap wilayah di Indonesia. masalah tersebut yang menciptakan penurunan kualitas perkotaan, salah satunya dirasakan oleh Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi. Diketahui, Kota Jambi adalah suatu daerah dengan pembangunan daerah yang tinggi terkhususnya di kawasan jantung kota. Hal tersebut dilihat dengan tercukupinya pemberian layanan di Kota Jambi. Dengan demikian, lajunya pertumbuhan tersebut dapat menghambat penyediaan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi perlu dirawat mengingat fungsinya yang dapat mendukung ekosistem lingkungan di Kota Jambi. Akan tetapi, Kota Jambi ialah pusat dari Provinsi Jambi dengan angka kependudukan yang tidak sedikit dibandingkan dengan kota lain. Selain itu bertambahnya area

² Budiman A., Sulistyanatara B. dan Zain A. F., 2014: Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya), Jurnal Lanskap Indonesia 6, Journal IPB, hlm 3

distribusi di Kota Jambi menjadikan kualitas udara yang buruk di Kota Jambi. Dengan itu, ruang terbuka hijau di Kota Jambi harus memperoleh perhatian melalui kenaikan luasan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang diutamakan dalam Pembangunan serta pengembangan taman hutan kota, taman kota, dan juga meningkatnya kualitas dan pelestarian ruang terbuka hijau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi pada pasal 47 ayat (1) yang berisi ruang terbuka hijau privat 10% atau kurang lebih 1.764,29 Ha dan ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20% yang luasnya kurang lebih 3.617,50 Ha, namun yang terjadi sekarang ini luas ruang terbuka hijau publik Kota Jambi berada di bawah 20%. Luas wilayah perkotaan Kota Jambi itu sendiri sebesar 205.4 km² yang disebar ke dalam 11 kecamatan. Akan tetapi, sekarang ruang terbuka hijau perkotaan jambi dengan luas 13,14%³ dari luas wilayah Kota Jambi . Sementara ruang terbuka hijau publik yang semestinya ialah 20% dari wilayah Kota Jambi Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pemerintah Kota Jambi belum belum mampu memenuhi persyaratan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji mengenai ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi.

Adapun tujuan dari penelitian ialah agar dapat memahami implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau Publik yang masih di bawah 20% menjadi kewajiban Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memnuhinya. Akan tetapi usaha dalam mengimplementasikan kebijakan ruang

³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024

terbuka hijau publik itu diperlukannya *stakeholder* untuk dapat membantu guna meningkatnya penyediaan ruang terbuka hijau dengan baik dan cukup.

Adapun pada penelitian terdahulu dalam menganalisis implementasi kebijakan RTH di wilayah perkotaan peneliti memakai teori dari Mazmanian dan Sabatier tentang implementasi kebijakan publik. Pada teori tersebut, dikatakan bahwa keberhasilan Ruang terbuka Hijau publik dilihat apabila sudah terpenuhinya tiga variabel yaitu variable karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta lingkungan⁴.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selaku implementator pada program pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik berkolaborasi bersama dinas pertanahan guna mampu terpenuhinya ketentuan yang sudah dirumuskan pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 penataan ruang⁵.

Kemudian, Tidak maksimalnya kebijakan karena adanya berbagai factor, yakni mengenai dana, problem komunikasi, serta kebijakan lingkungan. terdapat kelemahan dalam penelitian ini yakni minimnya sumber data tanggapan masyarakat tentang seberapa penting ruang terbuka hijau itu dibutuhkan dan juga nihilnya pemaparan tentang prosedur SOP yang dilaksanakan yang dapat mengarahkan jalannya pengadaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau⁶.

⁴ Alivia Rizki, 2021. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm 1

⁵ Priyanto Heri. 2018 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, hlm 1.

⁶ Ayunadra Chairunnisa, 2021 : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Hlm 1

Selanjutnya, implementasi yang masih belum maksimal. Pengkoordinasian serta profesionalitas kerja yang masih kurang, dan lahan yang masih sedikit serta minimnya keikutsertaan warga dalam kebijakan itu sendiri. Kelemahan lain pada penelitian ini ialah nihilnya uraian tentang alur komunikasi dari perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan.⁷

Kemudian, Sedangkan penelitian lain pengadaan ruang terbuka hijau dalam pengelolaan lingkungan di Kota Lhokseumawe masih belum dilaksanakan secara maksimal, baik dari penghijauan, warga sekitar, dan juga adanya perubahan fungsi dari wilayah penghijauan menjadi lokasi para pedagang kaki lima yang mulanya adalah wilayah ruang terbuka hijau namun berubah fungsi menjadi tempat dagang. Akan tetapi, pemerintah juga mengkhawatirkan perekonomian warganya sehingga adanya izin sementara dari pemerintah untuk warganya yang mau berdagang di kawasan itu⁸.

Melalui pertimbangan latar belakang dari penelitian diatas, dan juga berbagai problem tersebut menciptakan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti pengadaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di kota jambi yang judulnya ialah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI”**

⁷ Halimah, H.M Uhaib As'ad, A.Nikhrawi Hamdie, 2020 : berjudul implementasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau (rth) di dinas lingkungan hidup kota Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, Hlm 2

⁸ Yeni Mawaddah, Anismar, 2022 : Implementasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau (RTH) Terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Hlm 2

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a.. Bagaimana implementasi pemerintah daerah Kota Jambi dalam memenuhi ruang terbuka hijau publik dalam kawasan perkotaan ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemenuhan ruang terbuka hijau publik atas penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Jambi dalam memenuhi ruang terbuka hijau publik dalam kawasan perkotaan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemenuhan ruang terbuka hijau publik atas penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi..

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam memperluas keilmuan dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa serta mahasiswi yang nantinya berminat atau tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penataan ruang terbuka hijau, serta juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Tujuannya agar temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat serta wawasan mengenai informasi implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kawasan perkotaan jambi serta informasi mengenai apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengimplementasian kebijakan penataan ruangt terbuka hijau

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan guna untuk mencapai tujuan yang telah disahkan oleh lembaga pemerintah. Tujuan dari suatu kebijakan yang disahkan dan program mengenai pelaksanaan yang telah terbentuk., maka proses pelayanan suatu kebijakan akan segera dimulai.⁹

Implementasi kebijakan merupakan suatu media untuk administrasi hukum yang dilakukan oleh beberapa actor untuk bekerjasama dengan tujuan melaksanakan suatu kebijakan yang nantinya berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan suatu gagasan, ide serta rangkaian kegiatan atau tindakan yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan dan didalamnya terdapat elemen-elemen dan penentuan untuk menentukan bagaimana arah dari suatu kebijakan yang nantinya akan berjalan. Program pemerintah dalam menjalankan

⁹ Alivia Rizki, 2021. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm 7

program penataan ruang terbuka hijau di Kota Jambi dan untuk melihat proses terhadap evaluasi yang dipilih nantinya yang mana akan menentukan kecocokan keharmonisan dan dapat berguna untuk keselamatan di sekitar Kawasan.

Oleh karena itu, program pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau dapat diartikan sebagai terobosan ide, gagasan, dan ide dalam usaha kecocokan lingkup penataan ruang terbuka hijau dan lingkungan ruang terbuka hijau buatan yang inti dari perencanaan kota yang sehat..

Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini menggunakan beberapa variabel yang nantinya akan digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan telah berjalan dengan baik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, serta struktur birokrasi. Nantinya keempat variabel inilah yang akan menggambarkan bagaimana implementasi suatu kebijakan tersebut, yang sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi/Penyampaian

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b.kejelasan

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

c.Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif . Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik . Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a.Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.

b.Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Sikap atau Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan

usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat tampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi salah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada .

4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas . Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

a. Standard

Operational Procedure (SOP). Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (standard operational procedure). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang

tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan antara lain ¹⁰:

a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. jenis manfaat yang akan dihasilkan

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

¹⁰ Dedy Mulyadi. 2018. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Alfabeta : Bandung Hlm 66.

- c. perubahan visi yang diinginkan.

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

- d. proses pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- e. pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

- f. sumber daya yang dikerahkan

Sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Peneliti memakai teori George C. Edward III karena teori ini berfokus pada factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan ,dengan demikian teori George C. Edward III dapat membantu peneliti dalam memahami, mendalami dan untuk mengerti factor factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

1.5.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang didalam perkotaan atau daerah yang memiliki fungsi sebagai Kawasan hijau baik itu taman kota, pekarangan hutan kota, dan area rekreasi ataupun olahraga yang berbentuk memanjang dan bersifat terbuka tanpa adanya bangunan.¹¹

Ruang terbuka hijau terbagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka hijau publik merupakan suatu wilayah atau kawasan yang menjadi dan merupakan tanggung jawab oleh pemerintah daerah yang memiliki berbagai macam fungsi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum seperti taman kota, tempat pemakaman umum dan juga sebagai jalur hijau sepanjang Pantai, jalan , dan Sungai.

Suatu perencanaan ruang terbuka hijau mengungkapkan upaya untuk menjaga kesinambungan diantara generasi-generasi, sehingga nantinya diharapkan akan menghasilkan bentuk, fungsi, peran, dan arah ruang terbuka hijau pada masing-masing daerah, baik ruang terbuka hijau alami seperti kawasan hutan lindung, taman nasional dan juga ruang terbuka hijau non alami sebagai hasil olah karya suatu tata kelola ruang untuk alokasi ruang terbuka hijau non alami.

Penataan ruang terbuka hijau pada suatu perkotaan, memiliki tujuan sebagai keseimbangan dan keserasian ekosistem di lingkungan perkotaan, terwujudnya keseimbangan antara ruang terbuka hijau alami dan buatan, serta guna meningkatkan kualitas lingkungan di suatu perkotaan yang indah, nyaman bersih dan sehat..

¹¹ mendagri No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

Dalam tata ruang, maka ruang terbuka hijau publik merupakan yang khusus direncanakan pada suatu wilayah, yang tersusun atas ruang terbuka hijau dan ruang-ruang non hijau. Ruang terbuka hijau memiliki peran dan fungsi pada masing-masing daerah yang ada pada setiap perencanaan tata ruang wilayah yang dikhususkan dalam penataan bentuk vegetasi, tanaman, serta tumbuhan agar ruang terbuka hijau dapat berperan dalam mendukung fungsi sosial budaya, ekonomi, dan arsitektural, sehingga nantinya Masyarakat mendapat manfaat ekonomi dan kesejahteraan, sebagai berikut :

1. Fungsi ekologis, ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi peningkatan kualitas tanah air, mengurangi populasi udara, pencegahan terhadap banjir.
2. Fungsi sosial budaya, ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjadi peran utama dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sebagai penanda kawasan, dan juga sebagai sarana rekreasi untuk masyarakat.
3. Fungsi ekonomi, ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjadi peran utama sebagai pengembang wisata hijau, sehingga menarik minat terhadap masyarakat untuk berkunjung ke ruang terbuka hijau, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Fungsi arsitektural, ruang terbuka hijau diharapkan dapat meningkatkan nilai kenyamanan dan keindahan suatu kawasan, melalui keberadaan jalur hijau dan taman.

Idealnya ruang terbuka hijau sebuah wilayah memiliki luas 30% terdiri dari 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka .hijau privat. Bagi suatu wilayah

kekotaan akan menghadapi kondisi terhadap semakin menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan, dikarenakan desakan pertumbuhan sarana dan prasarana perkotaan.

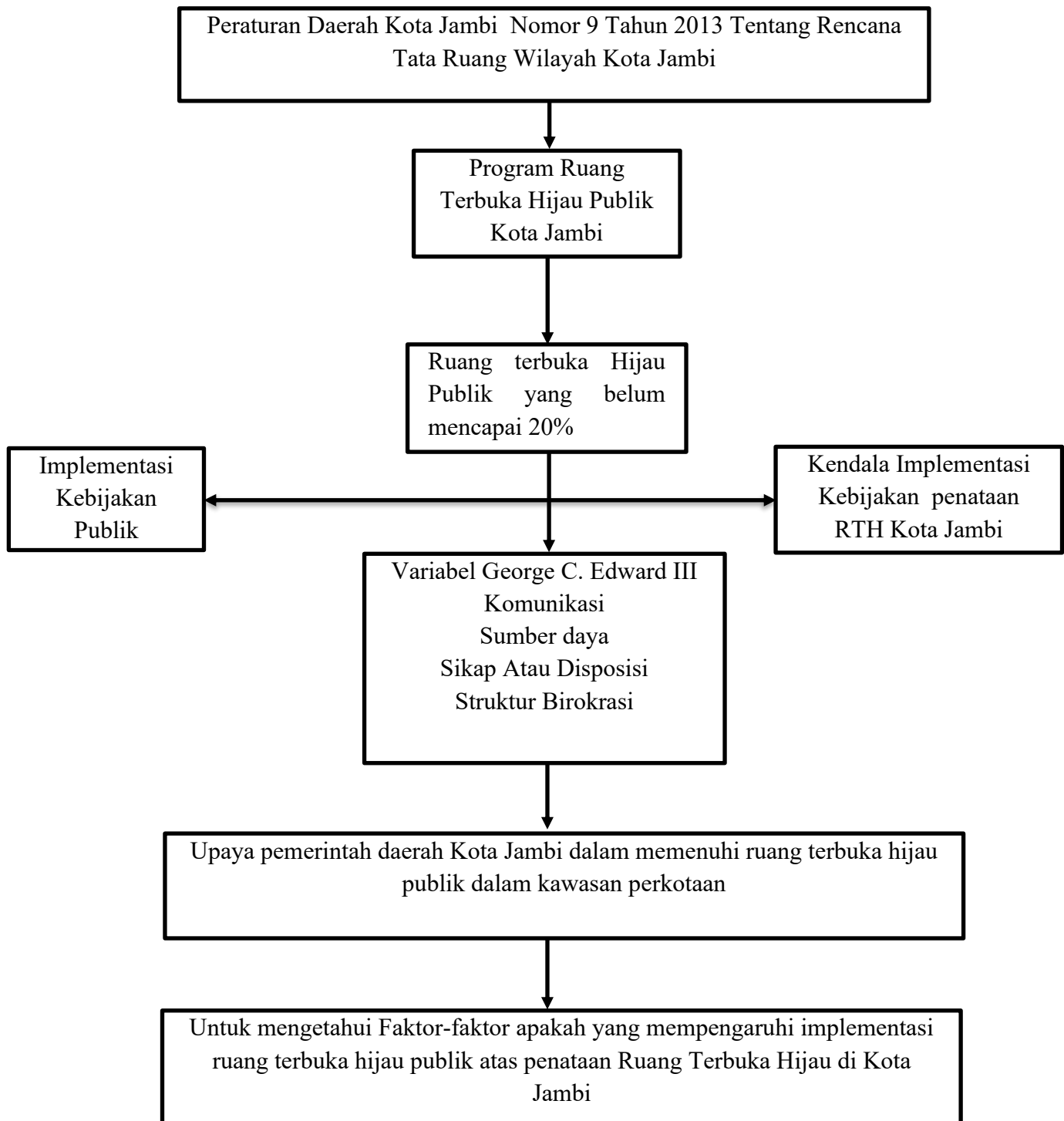
Perencanaan ruang terbuka hijau pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Agar dapat memberi manfaat bagi Dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang tercukupi, warga kota akan mendapatkan manfaat ruang terbuka hijau berupa klimatologis, ekologis, edukatif, dan estetika. Warga kota harus disadarkan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya berupa unsur vegetatif saja, walaupun pada dasarnya harus disadari bahwa dominasinya harus tampak. Unsur-unsur ekonomis, nilai estetika, dan sosial budaya diharapkan dapat memberi manfaat lebih dari suatu ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi 2 yaitu Ruang terbuka Hijau Publik dan Ruang terbuka Hijau Privat seperti berikut :

Tabel 1. Jenis Ruang terbuka Hijau Publik dan Privat

Jenis Ruang Terbuka Hijau Publik	Jenis Ruang Terbuka Hijau Privat
I. RTH Perkarangan	1. Area Wisata
a. Lapangan & Sarana Olahraga	2. Kebun Milik Masyarakat
b. Kantor/Instansi	3. Lahan Pertanian
II. RTH Taman dan hutan Kota	
a. Taman Kota	
b. Hutan Kota	
c. Taman Perumahan	
III. RTH Jalur Hijau Jalan	
a. Jalur Pejalan Kaki	
b. Median Jalan	
c. Pulau Jalan	
IV. RTH Fungsi Tertentu	
a. Sempadan Sungai	
b. Sempadan Danau	
c. Pemakaman	

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Penulis dalam peneliti kualitatif mencoba mengerti suatu makna kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dalam situasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian ¹². Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang kemudian disajikan secara naratif¹³.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia yang terkadang berdasarkan perspektif peneliti itu sendiri dengan tujuan memahami objek secara mendalam ¹⁴. Penelitian kualitatif juga menekankan pada analisis proses dengan cara berpikir induktif yang berkaitan dengan fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika

¹² A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 328

¹³ Ibid.Muri Yusuf, Hlm. 329.

¹⁴ Imam Gunawan, 2015. Metode Penelitian Kualitatif : *Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara Jakarta. Hlm. 80.

ilmiah¹⁵. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif (belum pasti/ berubah) dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.¹⁶

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang beralamat Kelurahan Paal Lima, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos 36129..

1.7.3 Fokus Penelitian

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor riil di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian¹⁷. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap analisis implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (rth) kota jambi.

1.7.4 Sumber Data

Secara umum terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen penelitian yang biasa meliputi : pedoman observasi, dan pedoman wawancara¹⁸. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini dapat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ A. Muri Yusuf, M.Pd, *op.cit.*, hlm. 367.

¹⁸ Pahrudin HM, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15

diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Teknik ini akan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami pelaksanaan Program RTH di Dinas Lingkungan Kota Jambi. Informan yang dipilih adalah dari unsur Dinas Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan, Masyarakat sekitar Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi.

- a). Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
- b). Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi.
- c). Bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi.
- d). Bapak Muhammad Taufan Zhafran selaku Masyarakat di sekitar Ruang terbuka Hijau Publik

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan tanpa observasi karena fenomena telah lewat, diantaranya :

a. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung ¹⁹. Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik .²⁰

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan masih berhubungan dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif ²¹. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang ²². Salah satu dokumen yang akan digunakan adalah dengan menggunakan penelitian atau karya ilmiah yang masih terkait dengan penelitian ini.

¹⁹ A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 372.

²⁰ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 160.

²¹ A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 391.

²² Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 176.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain .²³

Sementara itu penjabaran lain, analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan melakukan kategorisasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab ²⁴. Penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) ²⁵.

1.7.8 Keabsahan Data

Menurut Mantja triangulasi dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti wawancara dan dokumentasi atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan ²⁶. Variabel triangulasi yang peneliti gunakan adalah berdasarkan perolehan data wawancara dari unsur Dinas Lingkungan Kota Jambi. Informan yang dipilih adalah dari unsur Dinas

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

²⁴ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 209.

²⁵ Ibid., hlm. 210-211.

²⁶ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 217-218.

Lingkungan, Masyarakat sekitar ruang terbuka hijau Kota Jambi, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Jambi. Triangulasi penulis gunakan dalam rangka memaksimalkan objektivitas penelitian.